

## ABSTRACT

*Procurement is government activities that involve third parties (private entities) to fulfill their needs through a tender process. That private corporations should submit the price and qualifications they have to enter bid competition. On the other hand, since 2017, we (Procurement Services Section) has officially become a more independent permanent institution which has a permanent and functional official status member of procurement committees. Furthermore, our procurement committee, which later transformed into a selection procurement committee, had expanded roles from just determining bid winner into Stakeholder adviser also Good and Service Procurement Information Center.*

*Those two fundamental changes are parts of the procurement center of excellence. Given the name 'excellence' has consequences that are not simple. This means the public acquisition work unit should have no gap at all. This study presents CoE (Center of Excellence) implementation vulnerabilities using qualitative methods and analyzes by qualitative analysis.*

*Several numbers of weak points found during the 2016-2018 period, for instance: the missing link between performance appraisal routines and selection of goods / services providers criteria, tender committee member's inability to detect bid-rigging, bid-rigging detection system absence, and lack of accountability to work owner for tender results. So, the term center of excellence in the procurement of goods/services is nothing but a mere word sweetener.*

**Keywords:** Public Goods/ Services Procurement Center of Excellence imperfection, Yogyakarta City UKPBJ, selection procurement committee accountability

## INTISARI

*Pengadaan adalah aktivitas-aktivitas pemerintah yang melibatkan pihak ketiga (swasta) untuk memenuhi kebutuhan mereka melalui proses tender. Perusahaan-perusahaan swasta itu harus memberikan penawaran harga dan kualifikasi yang mereka miliki untuk masuk dalam persaingan tender. Sejak tahun 2017, Bagian Layanan Pengadaan secara institutional telah menjadi institusi yang permanen dan independen yang memiliki kelompok kerja pemilihan yang permanen serta berstatus sebagai pejabat fungsional. Tak hanya itu, kelompok kerja di UKPBJ Kota Yogyakarta, yang kemudian diubah menjadi kelompok kerja pemilihan, telah diperluas perannya dari sekedar menentukan pemenang tender menjadi pendamping bagi Stakeholder sekaligus Pusat Informasi Pengadaan Barang/Jasa.*

*Dua perubahan fundamental ini adalah beberapa bagian dari Pusat Unggulan Pengadaan Barang/Jasa. Di sisi lain, menyandang predikat “unggul” sejatinya memiliki konsekuensi yang tak sederhana. Idealnya, unit kerja pengadaan publik tak memiliki celah sekecil apapun. Penelitian ini menguak kelemahan penerapan Pusat Keunggulan Pengadaan dengan menggunakan metode kualitatif dan dianalisa menggunakan analisis kualitatif.*

*Sejumlah titik lemah ditemukan sepanjang periode 2016-2018. Misalnya, rantai yang terputus antara kegiatan rutin penilaian penyedia dengan kriteria seleksi penyedia barang/jasa, ketidakmampuan kelompok kerja pemilihan dalam mendeteksi persekongkolan antar penyedia, ketiadaan mekanisme untuk mendeteksi persekongkolan antar penyedia serta tidak akuntabelnya kelompok kerja pemilihan terhadap pemilik pekerjaan mengenai hasil tender. Jadi, predikat pusat keunggulan pengadaan barang/jasa tak lebih dari sekedar kata-kata manis belaka.*

**Kata Kunci:** Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta, akuntabilitas kelompok kerja pemilihan